

TAHUN 2023

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LAKJIP SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TAHUN 2023

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| DAFTAR ISI | 1 |
| BAB I..... | 2 |
| PENDAHULUAN..... | 2 |
| 1. LATAR BELAKANG..... | 2 |
| 2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI | 3 |
| 3. STRUKTUR ORGANISASI | 4 |
| BAB II..... | 7 |
| PERENCANAAN KINERJA | 7 |
| 1. VISI & MISI..... | 7 |
| 2. TUJUAN | 10 |
| 3. SASARAN | 10 |
| 4. PERJANJIAN / PENETAPAN KINERJA | 10 |
| BAB III..... | 14 |
| AKUNTABILITAS KINERJA..... | 15 |
| 1. CAPAIN KINERJA ORGANISASI | 16 |
| 2. REALISASI ANGGARAN | 21 |
| BAB IV | 24 |
| PENUTUP | 24 |
| KESIMPULAN | 24 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dibentuk dengan Peraturan Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam tata laksana menyelenggarakan fungsi-fungsi staf dengan tugas pokok dan fungsi DPRD dapat terlaksana dengan baik, berhasil guna dan berdaya guna bagi kepentingan masyarakat.

Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan hal tersebut dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara mulai dari pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan padanya berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dirumuskan sebelumnya. Pertanggungjawaban berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja disampaikan kepada atasan masing-masing, kepada lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas yang berkewenangan dan akhirnya kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan serta dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

2. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 47 Tahun tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu:

1. Kedudukan

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang dipimpin oleh sekretaris Dewan yang secara teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, dan kepegawaian, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, menyiapkan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3. Fungsi

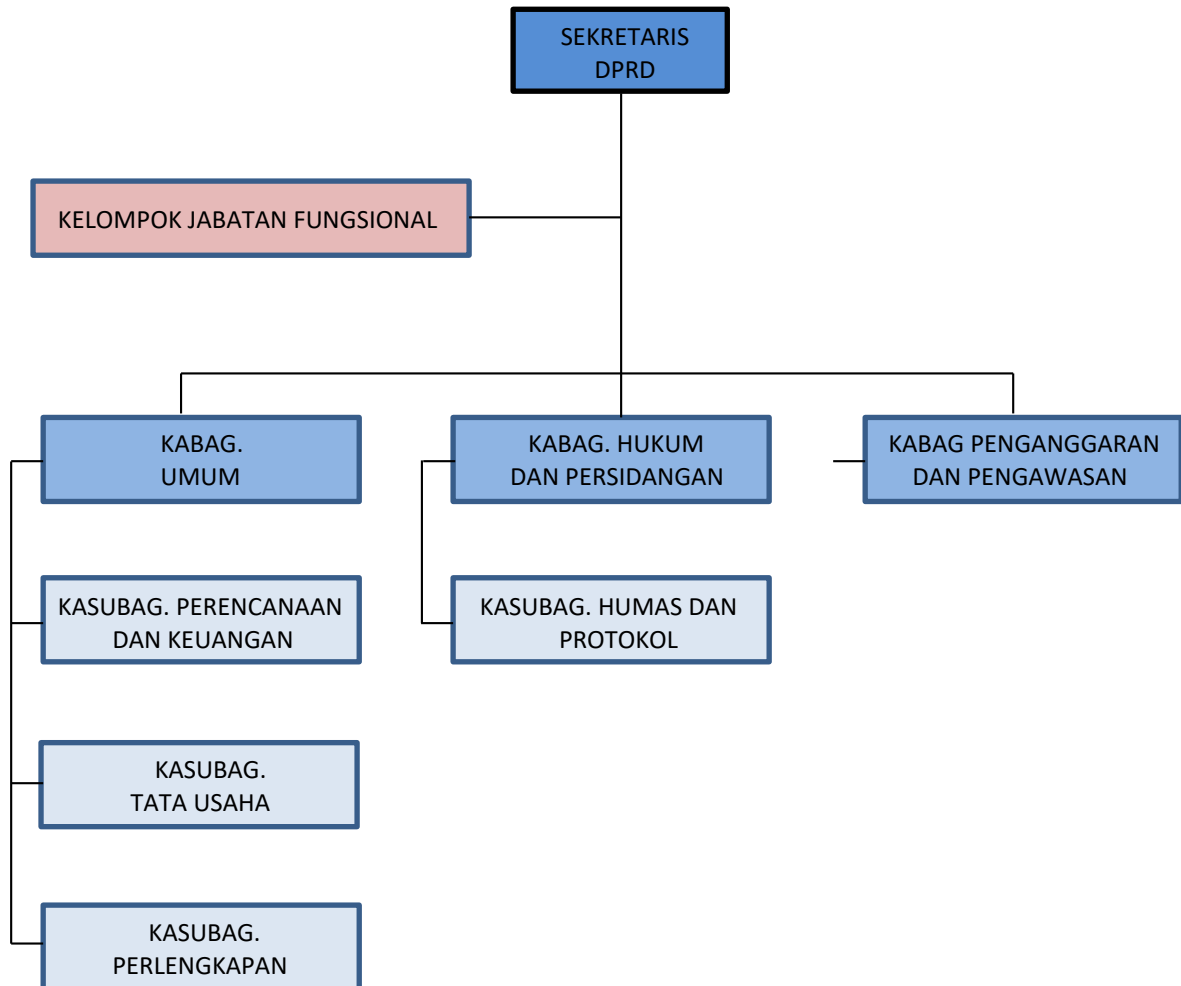
Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD, penyelenggara administrasi keuangan DPRD, penyelenggara administrasi kepegawaian DPRD, penyelenggara rapat-rapat DPRD, dan penyediaan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023, susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut terdiri dari:

1. Sekretaris Dewan
2. Kepala Bagian Umum terdiri atas :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Kepala Sub Bagian Perlengkapan
3. Kepala Bagian Hukum dan Persidangan terdiri atas :
 - a. Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol
4. Kepala Bagian Penganggaran dan Pengawasan terdiri atas :
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Jabatan Pelaksana

Struktur organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu selengkapnya diilustrasikan sebagaimana Gambar berikut ini :



Jumlah pegawai pada Sekretariat DPRD Kab. Luwu sebanyak 45 orang yang terdiri dari:

- a. Golongan IV = 4 orang
- b. Golongan III = 31 orang
- c. Golongan II = 4 orang

Dari jumlah 40 orang pegawai Sekretariat DPRD Kab. Luwu, klasifikasi pendidikan masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pasca Sarjana (S2) = 5 orang
- b. Sarjana (S1) = 30 orang
- c. Diploma 3 (D3) = 1 orang
- d. SMA = 4 orang

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu diberikan tugas sebagai unsur pelayanan terhadap Anggota Dewan, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu melaksanakan fungsi sebagai :

1. Penyelenggara administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggara administrasi keuangan DPRD
3. Penyelenggara administrasi kepegawaian DPRD
4. Penyelenggara rapat-rapat DPRD
5. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

1. VISI & MISI

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabuapten Luwu 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2019-2024. Bupati dan Wakil Bupati Luwu Mengusung Misi:

“LUWU SEBAGAI DAERAH YANG MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA DALAM NUANSA RELIGI”

Pada rumusan Visi Kabupaten Luwu 2019-2024 terkandung 4 (empat) frasa yang penting untuk diberikan penjabaran makna atau terdapat 4 (empat) pilar pokok yang penting untuk diberikan penjelasan, yaitu :

Maju : Kondisi masyarakat yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, ekonomi yang merata, sumber daya manusia yang berkualitas (adaptif dan kompetitif), derajat kesehatan yang membaik, dan terpenuhinya hak

pendidikan dasar, tercapainya tujuan pembangunan fisik dan non fisik, serta birokrasi yang profesional, inovatif, dan responsif.

- Sejahtera : Kondisi dimana masyarakat Kabupaten Luwu memiliki tata kehidupan dan penghidupan, mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan (material maupun spiritual), yang dilingkupi dengan suasana kehidupan yang religius, aman dan tentram.
- Mandiri : Mampu memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.
- Religi : Kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya, yang tercermin dalam tatanan kehidupan

Dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan misi ini adalah : Peradaban Manusia yang Maju, Masyarakat yang sejahtera, ekonomi yang mandiri dan kehidupan masyarakat Kabupaten Luwu yang religius. Keempat hal ini merupakan bidang garapan besar yang akan menjadi sebuah panduan dalam bagaimana memandang pembangunan di Kabupaten Luwu.

Adapun Misi tersebut terdiri dari:

1. Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa, amanah, transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan, melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja;
5. Mewujudkan ketahanan pangan dan perekonomian daerah yang tangguh berbasis agribisnis;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat kabupaten luwu yang religius;
7. Optimalisasi otonomi desa dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;

8. Menciptakan iklim investasi dan usaha yang kondusif berwawasan lingkungan dan sistem pengupahan yang berkeadilan;
9. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia untuk mendorong partisipasi publik;
10. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana.

Berdasarkan Visi dan ke sepuluh misi tersebut diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu menetapkan Visi dan Misi SKPD akan mengacu pada Misi Ke-Satu dan Ke-Sembilan dari Misi Pemerintah Kabupaten Luwu, Yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang profesional, berwibawa amanah transparan dan akuntabel” dan “Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia untuk mendorong partisipasi publik.”.

Adapun Visi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu adalah **“Terwujudnya Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Sebagai Fasilitator dan Mediator Pada Kegiatan DPRD Kabupaten Luwu”**. Dalam menunjang Visi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu telah menetapkan Misi :

1. Mengemabangkan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia agar tercapai pelayanan prima;
2. Menjalin dan mengembangkan hubungan kerjasama internal maupun eksternal agar tercapai iklimkerja yang kondusif;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana dalam rangka pencapaian pelayanan prima;
4. Menigkatkan kuantitas dan kualitas aparatur /pegawai agar lebih efektif, handal dan profesional;
5. Mengupayakan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan terhadap pelaksanaan sidang atau rapat Anggota Dewan;
6. Mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas naskah peraturan perundang-undangan DPRD Kabupaten Luwu;
7. Berperan sebagai mediator dan sekaligus sebagai fasilitator antara pihak Legislatif dengan Eksekutif dan antara Legislatif dan Masyarakat.

2. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Maka dengan mengacu pada visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu diatas, Sekretariat DPRD Kabupaten luwu mempunyai tujuan sebagai berikut yaitu :

1. Mewujudkan pelayanan Sekretariat DPRD yang berkualitas dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD
2. Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

3. SASARAN

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Fokus utamanya adalah tindakan dan alokasi Sumber Daya dalam pelaksanaan organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu, sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ditetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik
3. Meningkatnya Kapasitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

4. PERJANJIAN / PENETAPAN KINERJA

Target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu pada tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 2.1, target ini masih mengacu pada target

capaian awal SKPD walaupun telah mengalami refocusing anggaran, indikator dan target capaiannya secara rinci diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Sasaran, Indikator dan Target 2023

| Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target | Anggaran | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--|--|---|--|---------------|-----------|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mewujudkan Pelayanan Sekretariat Dprd Yang Berkualitas Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Dprd | Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | | Nilai Sakip OPD | Indeks | 75 | | Sekretariat DPRD |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | Cakupan ketersediaan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Persen | 100 | 22,545,495,747 | Sekretariat DPRD |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu | Persen | 97 | 33.863.300 | Bagian Umum |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun | Dokumen | 2 | 8.525.400 | Bagian Umum |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 3.562.500 | Bagian Umum |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 3.562.500 | Bagian Umum |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 3.562.500 | Bagian Umum |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 3.562.500 | Bagian Umum |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun | Dokumen | 1 | 11.087.900 | Bagian Umum |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian administrasi keuangan secara tepat waktu | Persen | 98 | 3.666.684.949 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan | Orang/Bulan | 504 | 3.376.946.849 | Bagian Umum |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen yang diverifikasi | Dokumen | 12 | 271.055.000 | Bagian Umum |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun | Laporan | 1 | 3.825.100 | Bagian Umum |
| | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan | Dokumen | 3 | 3.770.100 | Bagian Umum |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun | Laporan | 6 | 11.087.900 | Bagian Umum |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi baik | % | 95 | 8.662.600 | Bagian Umum |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan hasil pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan | 2 | 8.662.600 | Bagian Umum |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN dengan predikat kinerja baik | % | 96 | 400.746.000 | Bagian Umum |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen data dan pengelolaan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 6.360.000 | Bagian Umum |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis | Orang | 24 | 394.386.000 | Bagian Umum |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase pemenuhan administrasi perkantoran | % | 97 | 806.549.015 | Bagian Umum |

| Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target | Anggaran | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|----------------|-----------------|--|---|------------------|-----------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jenis | 6 | 9.747.950 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan | Jeniis | 5 | 6.117.000 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan | Jenis | 3 | 60.115.000 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Jenis | 5 | 22.455.240 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan | Jenis | 47 | 160.000.000 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan | Jenis | 3 | 93.404.825 | Bagian Umum |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan | Jenis | 42 | 9.600.000 | Bagian Umum |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | jumlah perjalanan dinas dalam dan Luar daerah | Kali | 6 | 445.109.000 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa | Persen | 97 | 878.636.500 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik | Bulan | 12 | 353.236.500 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Orang/Bu alan | 24 | 9.600.000 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor | Orang/Bu lan | 528 | 515.800.000 | Bagian Umum |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 90 | 462.692.130 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah mobil jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala | Unit | 3 | 160.070.510 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala | Unit | 32 | 217.409.520 | Bagian Umum |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Unit/Set | 165 | 29.299.100 | Bagian Umum |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | M2 | 15,000 | 55.913.000 | Bagian Umum |
| | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Cakupan penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persen | 98 | 12.811.912.229 | Bagian Umum |
| | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Dokumen Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Dokumen | 12 | 12.455.412.229 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | stell/ pasang | 180 | 356.500.000 | Bagian Umum |

| Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target | Anggaran | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|--|---|--|--|------------------|-----------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Layanan Administrasi DPRD | Cakupan penyelenggaraan layanan administrasi DPRD | Persen | 97 | 984.332.700 | Bagian Umum |
| | | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Fraksi DPRD yang difasilitasi | Fraksi | 10 | 120.000.000 | Bagian Umum |
| | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga | Jumlah bulan/kali pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD | Bulan | 36 | 864.332.700 | Bagian Umum |
| Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Meningkatkan Kapasitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | | Cakupan Ketersediaan Peraturan Daerah | Perda | 8 | | Sekretariat DPRD |
| | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | PERSENTASE PENYELESAIAN PENYUSUNAN PERDA SESUAI PROLEGDA | Persen | 98 | 7.562.624.800 | Sekretariat DPRD |
| | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Perda/Peraturan/Kajian/Naskah Akademik yang difasilitasi pembentukannya | Perda | 8 | 1.045.583.500 | Bagian Hukum & Persidangan |
| | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Program Legislasi Daerah yang disusun dan dibahas | Kab. Luwu | 1 | 1.700.000 | Bagian Hukum & Persidangan |
| | | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah rancangan Peraturan daerah yang dibahas | Ranperda | 3 | 908.883.500 | Bagian Hukum & Persidangan |
| | | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Naskah Akademik yang disusun | Naskah | 3 | 135.000.000 | Bagian Hukum & Persidangan |
| | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi | Kebijakan | 5 | 350.984.850 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah rapat dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS | Kali | 8 | 6.525.000 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah rapat dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS Perubahan | Kal | 8 | 2.400.000 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Pembahasan APBD | Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan APBD | Kal | 8 | 136.140.000 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan APBD Perubahan | Kal | 8 | 111.250.000 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Kali | 6 | 94.669.850 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi | Kegiatan | 2 | 144.134.050 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah rapat dalam rangka Pengawasan Penggunaan Anggaran | Kali | 90 | 52.000.000 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah rapat dalam rangka Laporan Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Kali | 6 | 92.134.050 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas DPRD | Persen | 95 | 1.761.008.100 | Bagian Hukum & Persidangan |
| | | Bimbingan Teknis DPRD | Jumlah anggota DPRD/kali mengikuti bimbingan teknis | Orang/Kegiatan | 105 | 1.433.306.600 | Bagian Hukum & Persidangan |
| | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah kegiatan Dewan yang dipublikasikan dan didokumentasikan | Kegiatan | 12 | 24.801.500 | Bagian Hukum & Persidangan |
| | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah pakar dan tim ahli yang disediakan | Orang | 2 | 96.000.000 | Bagian Hukum & Persidangan |

| Tujuan Renstra | Sasaran Renstra | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target | Anggaran | Unit Kerja Penanggung Jawab |
|----------------|-----------------|--|--|----------------|-----------|----------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah orang/bulan penyediaan tenaga ahli fraksi | Orang/Bulan | 120 | 178.500.000 | Bagian Hukum & Persidangan |
| | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah pertemuan dengan masyarakat | Kali | 3 | 16.400.000 | Bagian Hukum & Persidangan |
| | | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah rapat dalam rangka Penyusunan Program Kerja DPRD | Kali | 12 | 12.000.000 | Bagian Hukum & Persidangan |
| | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Cakupan penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persen | 95 | 1.293.982.900 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Kunjungan Kerja Dalam Daerah | Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan kunjungan kerja | Orang/Kegiatan | 420 | 101.299.900 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD | Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun | Dokumen | 3 | 4.760.000 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Pelaksanaan Reses | Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan Reses | Orang/Kegiatan | 105 | 1.187.923.000 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Fasilitasi Tugas DPRD | Cakupan penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persen | 94 | 2.966.931.400 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan kunjungan kerja | Orang/Kegiatan | 35 | 2.963.331.400 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |
| | | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun | Dokumen | 1 | 3,600,000 | Bagian Penganggaran & Pengawasan |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

| | |
|---------------|-------------------|
| $X > 85$ | : Sangat Berhasil |
| $70 < X < 85$ | : Berhasil |
| $55 < X < 70$ | : Cukup Berhasil |
| $X < 55$ | : Tidak Berhasil |

Tingkat capaian indikator tujuan dan sasaran sekretariat DPRD kabupaten luwu merupakan salah satu faktor pendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati Luwu yang telah dijabarka dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), target capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 3.1**Target capaian Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu tahun 2023**

| No | Tujuan | Sasaran | Indicator Sasaran | Target |
|----|--|--|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | Mewujudkan Pelayanan Sekretariat Dprd Yang Berkualitas Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Dprd | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Nilai Sakip OPD | B (Nilai 75) |
| 2 | Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Meningkatnya Kapasitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Cakupan Ketersediaan Peraturan Daerah | 84 % |

1. CAPAIN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran dan hasil. Sedangkan hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro dan indikator mikro penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup :

1. Kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan;

2. Tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan.

Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capaian suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu berdasarkan indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat sebagai berikut:

| No | Tujuan | Sasaran | Indicator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian Kinerja |
|----|--|--|---------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 1 | Mewujudkan Pelayanan Sekretariat Dprd Yang Berkualitas Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Dprd | Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | Nilai Sakip OPD | B (Nilai 75) | B (Nilai 72.25) | 96.33 % |
| 2 | Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Meningkatnya Kapasitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Cakupan Ketersediaan Peraturan Daerah | 84 % | 77 % | 91.66 % |

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Tabel Pengukuran Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Tahun 2023

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|---|---|--|---------------|------------|------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Mewujudkan Pelayanan Sekretariat Dprd Yang Berkualitas Dalam Mendukung Tugas Dan Fungsi Dprd | Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | | Nilai Sakip OPD | Indeks | 75 | 65 | 86 |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | Cakupan ketersediaan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah | Persen | 100 | 100 | 100 |
| | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja secara tepat waktu | Persen | 97 | 97 | 100 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Renstra dan Renja serta perubahan Renstra dan Renja yang disusun | Dokumen | 2 | 2 | 100% |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 100% |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 100% |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 100 % |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 100% |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun | Dokumen | 1 | 2 | 100% |
| | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase penyelesaian dokumen administrasi keuangan secara tepat waktu | Persen | 98 | 98 | 100% |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan | Orang /Bulan | 504 | 480 | 95.23% |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen yang diverifikasi | Dokumen | 12 | 12 | 100% |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang disusun | Laporan | 1 | 12 | 100% |
| | | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | Bahan tanggapan pemeriksaan yang dikelola dan disiapkan | Dokumen | 3 | 3 | 100% |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran yang disusun | Laporan | 6 | 6 | 100% |
| | | Administrasi Barang Milik Daerah | Persentase Barang Milik daerah dalam kondisi baik | % | 95 | 100 | 100% |
| | | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Laporan hasil pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah | Laporan | 2 | 2 | 100% |
| | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN dengan predikat kinerja baik | % | 96 | 100 | 100% |
| | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Dokumen data dan pengelolaan administrasi kepegawaian | Dokumen | 12 | 12 | 100% |
| | | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis | Orang | 24 | 59 | 203% |
| | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Presentase pemenuhan administrasi perkantoran | % | 97 | 97 | 100% |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan | Jenis | 6 | 8 | 160% |
| | | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang disediakan | Jeniis | 5 | 5 | 83% |
| | | Penyediaan Bahan Logistik | Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan | Jenis | 3 | 17 | 154% |
| | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan | Jenis | 5 | 4 | 133% |
| | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundangan yang disediakan | Jenis | 47 | 5 | 100% |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target | Realisasi | Persentase |
|---|--|--|---|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Jenis/Bahan Material Kebutuhan kantor yang disediakan | Jenis | 3 | 47 | 1006% |
| | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah jenis jamuan makan dan minum yang disediakan | Jenis | 42 | 3 | 107% |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | jumlah perjalanan dinas dalam dan Luar daerah | Kali | 6 | 45 | 137% |
| | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyelenggara penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan jasa | Persen | 97 | 96 | 98% |
| | | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah bulan penyediaan biaya tagihan telepon, air dan listrik | Bulan | 12 | 12 | 100% |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah jasa operasional peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan | Orang/Bulan | 24 | 24 | 100% |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah jasa pelayanan umum kantor | Orang/Bulan | 528 | 364 | 68.93% |
| | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Cakupan penyelenggaraan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persen | 90 | 90 | 100% |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah bulan jabatan yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala | Unit | 3 | 3 | 100% |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan pemeliharaan rutin/berkala | Unit | 32 | 30 | 93.75% |
| | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara | Unit/Set | 165 | 34 | 21% |
| | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Luas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | M2 | 15,000 | 15.000 | 100% |
| | | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Cakupan penyelenggaraan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Persen | 98 | 98 | 100% |
| | | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Dokumen Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD | Dokumen | 12 | 12 | 100% |
| | | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang disediakan | stell/pasang | 180 | 210 | 116% |
| | | Layanan Administrasi DPRD | Cakupan penyelenggaraan layanan administrasi DPRD | Persen | 97 | 97 | 100% |
| | | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Fraksi DPRD yang difasilitasi | Fraksi | 10 | 10 | 100% |
| | | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga | Jumlah bulan/kali pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD | Bulan | 36 | 36 | 100% |
| Meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | Meningkatkan Kapasitas dan Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah | | Cakupan Ketersediaan Peraturan Daerah | Perda | 8 | 6 | 75% |
| | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD | PERSENTASE PENYELESAIAN PENYUSUNAN PERDA SESUAI PROLEGDA | Persen | 98 | 98 | 100% |
| | | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Jumlah Perda/Peraturan/Kajian/Naskah Akademik yang difasilitasi pembentukannya | Perda | 9 | 7 | 75% |
| | | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Program Legislasi Daerah yang disusun dan dibahas | Kab. Luwu | 1 | 1 | 100% |
| | | Pembahasan Rancangan Perda | Jumlah rancangan Peraturan daerah yang dibahas | Ranperda | 3 | 3 | 100% |
| | | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | Jumlah Naskah Akademik yang disusun | Naskah | 3 | 3 | 100% |

| Tujuan | Sasaran | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Satuan | Target | Realisasi | Persentase |
|--------|---------|--|--|------------------|-----------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Jumlah pembahasan kebijakan anggaran yang difasilitasi | Kebijakan | 5 | 5 | 100% |
| | | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah rapat dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS | Kali | 8 | 7 | 87.5% |
| | | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah rapat dalam rangka pembahasan KUPA dan PPAS Perubahan | Kal | 8 | 7 | 87.5% |
| | | Pembahasan APBD | Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan APBD | Kal | 8 | 7 | 87.5% |
| | | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan APBD Perubahan | Kal | 8 | 7 | 87.5% |
| | | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah rapat dalam rangka Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Kali | 6 | 6 | 100% |
| | | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | Jumlah pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang difasilitasi | Kegiatan | 2 | 2 | 100% |
| | | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah rapat dalam rangka Pengawasan Penggunaan Anggaran | Kali | 90 | 90 | 100% |
| | | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah rapat dalam rangka Laporan Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Kali | 6 | 6 | 100% |
| | | Peningkatan Kapasitas DPRD | Cakupan penyelenggaraan peningkatan kapasitas DPRD | Persen | 95 | 90 | 94% |
| | | Bimbingan Teknis DPRD | Jumlah anggota DPRD/kali mengikuti bimbingan teknis | Orang/Kegiatan | 105 | 100 | 95.23% |
| | | Publikasi dan Dokumentasi Dewan | Jumlah kegiatan Dewan yang dipublikasikan dan didokumentasikan | Kegiatan | 12 | 12 | 100% |
| | | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah pakar dan tim ahli yang disediakan | Orang | 2 | 2 | 100% |
| | | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah orang/bulan penyediaan tenaga ahli fraksi | Orang/Bulan | 120 | 103 | 85.83% |
| | | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah pertemuan dengan masyarakat | Kali | 3 | 3 | 100% |
| | | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah rapat dalam rangka Penyusunan Program Kerja DPRD | Kali | 12 | 12 | 100% |
| | | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Cakupan penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persen | 95 | 90 | 94% |
| | | Kunjungan Kerja Dalam Daerah | Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan kunjungan kerja | Orang/Kegiatan | 420 | 319 | 75.95% |
| | | Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD | Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun | Dokumen | 3 | 3 | 100% |
| | | Pelaksanaan Reses | Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan Reses | Orang/Kegiatan | 105 | 103 | 98.09% |
| | | Fasilitasi Tugas DPRD | Cakupan penyelenggaraan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Persen | 94 | 95 | 100% |
| | | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Jumlah anggota DPRD/kali pelaksanaan kunjungan kerja | Orang/Kegiatan | 35 | 312 | 891% |
| | | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun | Dokumen | 1 | 1 | 100% |

Kinerja kegiatan tersebut pada akhir tahun hampir semuanya telah mencapai target yang diharapkan, walaupun pencapaian indikator kinerja utama masih di bawah dari target, yakni Cakupan Ketersediaan Peraturan Daerah dengan target 8 perda, yang tercapai hanya 6 perda atau 75% dari target capaian.

2. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai indikator keberhasilan sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian depan, selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 693 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2023.

Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Program, Kegiatan, Pagu & Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023

| KEGIATAN | BELANJA | | |
|--|----------------|----------------|------------|
| | ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAKBUPATEN KOTA | 20,054,079,423 | 19,671,769,852 | 98% |
| <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | 33,863,300 | 30,599,900 | 90% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8,525,400 | 8,444,950 | 99% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3,562,500 | 3,080,000 | 86% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3,562,500 | 3,562,500 | 100% |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3,562,500 | 1,095,000 | 31% |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 3,562,500 | 3,542,500 | 99% |
| Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 11,087,900 | 10,874,950 | 98% |
| <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | 3,666,684,949 | 3,624,012,269 | 99% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 3,376,946,849 | 3,341,631,619 | 99% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 271,055,000 | 267,340,000 | 99% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 3,825,100 | 3,788,250 | 99% |
| Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan | 3,770,100 | 3,658,050 | 97% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 11,087,900 | 7,594,350 | 68% |
| <i>Administrasi Barang Milik Daerah</i> | 8,662,600 | 8,580,550 | 99% |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 8,662,600 | 8,580,550 | 99% |
| <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | 400,746,000 | 345,762,028 | 86% |

| KEGIATAN | BELANJA | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------|
| | ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 6,360,000 | 4,515,000 | 71% |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | 394,386,000 | 341,247,028 | 87% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 806,549,015 | 663,462,636 | 82% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 9,747,950 | 9,725,000 | 100% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 6,117,000 | 6,105,000 | 100% |
| Penyediaan Bahan Logistik | 60,115,000 | 60,113,800 | 100% |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 22,455,240 | 22,448,600 | 100% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | 160,000,000 | 149,050,000 | 93% |
| Penyediaan Bahan/Material | 93,404,825 | 92,515,000 | 99% |
| Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9,600,000 | 4,560,000 | 48% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 445,109,000 | 318,945,236 | 72% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 878,636,500 | 864,061,633 | 98% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik | 353,236,500 | 343,261,633 | 97% |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 9,600,000 | 9,600,000 | 100% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 515,800,000 | 511,200,000 | 99% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 462,692,130 | 413,142,404 | 89% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Peorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 160,070,510 | 140,723,625 | 88% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 217,409,520 | 197,149,779 | 91% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 29,299,100 | 19,359,000 | 66% |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 55,913,000 | 55,910,000 | 100% |
| Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | 12,811,912,229 | 12,741,896,432 | 99% |
| Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | 12,455,412,229 | 12,386,148,182 | 99% |
| Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | 356,500,000 | 355,748,250 | 100% |
| Layanan Administrasi DPRD | 984,332,700 | 980,252,000 | 100% |
| Fasilitasi Fraksi DPRD | 120,000,000 | 120,000,000 | 100% |
| Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga | 864,332,700 | 860,252,000 | 100% |
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | 7,562,624,800 | 6,526,296,733 | 86% |
| Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | 1,045,583,500 | 930,532,188 | 89% |
| Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 1,700,000 | 1,680,000 | 99% |
| Pembahasan Rancangan Perda | 908,883,500 | 838,852,188 | 92% |
| Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik | 135,000,000 | 90,000,000 | 67% |
| Pembahasan Kebijakan Anggaran | 350,984,850 | 277,005,378 | 79% |
| Pembahasan KUA dan PPAS | 6,525,000 | 6,525,000 | 100% |

| KEGIATAN | BELANJA | | |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------|
| | ANGGARAN | REALISASI | PERSENTASE |
| Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | 2,400,000 | 2,100,000 | 88% |
| Pembahasan APBD | 136,140,000 | 89,443,800 | 66% |
| Pembahasan APBD Perubahan | 111,250,000 | 110,992,500 | 100% |
| Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 94,669,850 | 67,944,078 | 72% |
| Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | 144,134,050 | 97,638,462 | 68% |
| Pengawasan Penggunaan Anggaran | 52,000,000 | 27,655,000 | 53% |
| Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 92,134,050 | 69,983,462 | 76% |
| Peningkatan Kapasitas DPRD | 1,761,008,100 | 1,161,975,496 | 66% |
| Bimbingan Teknis DPRD | 1,433,306,600 | 857,346,496 | 60% |
| Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 24,801,500 | 23,919,000 | 96% |
| Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | 96,000,000 | 92,000,000 | 96% |
| Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 178,500,000 | 166,000,000 | 93% |
| Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 16,400,000 | 10,850,000 | 66% |
| Penyusunan Program Kerja DPRD | 12,000,000 | 11,860,000 | 99% |
| Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | 2,966,931,400 | 2,804,210,196 | 95% |
| Kunjungan Kerja Dalam Daerah | 2,963,331,400 | 2,803,460,196 | 95% |
| Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD | 3,600,000 | 750,000 | 21% |
| Pelaksanaan Reses | 2,966,931,400 | 2,804,210,196 | 95% |
| Fasilitasi Tugas DPRD | 2,963,331,400 | 2,803,460,196 | 95% |
| Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 3,600,000 | 750,000 | 21% |
| Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | 2,966,931,400 | 2,804,210,196 | 95% |
| Total | 27.616.704.223 | 26,198,066,585 | 94.86 % |

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Dari keseluruhan sasaran telah memenuhi capaian target sasaran pada tahun 2023 dengan capaian kinerja sangat berhasil. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang berharga bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

Sebagai bagian penutup dari LAKJIP Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2023 hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, dan masyarakat.

Belopa, 4 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN LUWU



Drs. H. BUSTAN, M.Si.
RKT Pembina Utama Muda
NIP. 197212171993031004